PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi

Diajukan Oleh :
YUNI MULIA FITRI
NPM. 20.01.12.0060

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2026

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: YUNI MULIA FITRI
Nomor Pokok/NPM	: 2001120060
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 28/10/2026 Pembimbing I : .....
Kusminaini Armin, SE.,MM
NIDN: 0222086301

Tanggal 28/10/2026 Pembimbing II : .....
Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CPA.,M.Ak
NIDN: 0224108301

Mengetahui,

Dekan

Dr. Hj. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.CA.,CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi

Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CA.,CPA.,M.Ak
NIDN: 0224108301

ii

007 /PS/DFEB/ 26

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: YUNI MULIA FITRI
Nomor Pokok/NPM	: 2001120060
Jurusan/Prodi	: Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Pendidikan	: Strata 1
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Penguji Skripsi :

Tanggal 28/10/2026 Ketua Penguji : .....
Kusminaini Armin, SE.,MM
NIDN: 0222086301

Tanggal 28/10/2026 Penguji I : .....
Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CPA.,M.Ak
NIDN: 0224108301

Tanggal 28/10/2026 Penguji II : .....
Dr. Hj. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Mengesahkan,

Dekan,
Tanggal 28/10/2026
Dr. Hj. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSRS
NIDN: 0205026401

Ketua Program Studi,
Tanggal 28/10/2026
Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CPA.,M.Ak
NIDN: 0224108301

iii

007 /PS/DFEB/ 2026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Knowladge Is Power”

“Even if it’s hard, let’s do it” - Kim Namjoon

Kupersembahkan Kepada :

- Orang Tua ku
- Dosen Pembimbingku
- Almamaterku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUNI MULIA FITRI
Nomor Pokok/NPM	: 200112000
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, Juli 2025



YUNI MULIA FITRI

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir"** dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan salah satu syarat akademis yang telah ditetapkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan serta bantuan baik secara moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal SE.,M.S, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.CA.,CSRS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.,CA.,CPA.,M.Ak selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Kusminaini Armin, SE.,MM, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA,.CPA.,M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

6. Kepala dan Staf Kantor Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin penelitian.
7. Bapak Amrah Muslimin, you’re my everything. Dan juga kedua Umakku tersayang, yaitu Ibu Nurhayati (Almh) dan Ibu Zulpawati. Serta Saudara/i ku yang menjadi alasan diriku untuk terus tetap bertahan, you’re my world.
8. Teman-teman seperjuangan di Universitas Tridinanti Palembang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharpkan kritik dan saran guna perbaikan dimasa mendatang.

Palembang, Oktober 2026

Penulis,

YUNI MULIA FITRI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
ABSTRAK xv
RIWAYAT HIDUP xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis 14
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik 14
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 14
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 15
2.1.1.3 Bidang Akuntansi Sektor Publik 15
2.1.2 Akuntabilitas 16
2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas 19
2.1.3 Sistem Keuangan Desa 19

2.1.3.1 Indikator Sistem Keuangan Desa 21
2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa 21
2.1.4.1 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 23
2.1.5 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 24
2.1.5.1 Indikator Sistem Keuangan Desa 26
2.2 Penelitian Yang Relevan 27
2.3 Kerangka Berpikir 30
2.4 Hipotesis 31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 32
3.1.1 Tempat Penelitian 32
3.1.2 Waktu Penelitian 32
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 32
3.2.1 Sumber Data 32
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 33
3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling 34
3.3.1 Populasi 34
3.3.2 Sampel 34
3.3.3 Sampling 35
3.4 Rancangan Penelitian 36
3.5 Variabel dan Definisi Operasional 37
3.6 Instrumen Penelitian 38
3.7 Teknik Analisis 38
3.7.1 Uji Kualitas Data 39
3.7.1.1 Validitas 39
3.7.1.2 Reliabilitas 40
3.7.2 Uji Normalitas 40
3.7.3 Uji Asumsi Klasik 41
3.7.3.1 Uji Multikolinearitas 41
3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 41

3.7.2.3 Uji Autokorelasi..... 42
3.7.4 Uji Regresi Linear Berganda..... 43
3.7.5 Uji Hipotesis..... 43
3.7.5.1 Uji F (simultan) 43
3.7.5.2 Uji t (Parsial)..... 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 42
4.1.1 Sejarah Kantor Kecamatan Tanjung Batu..... 43
4.1.1.1 Visi Kantor Kecamatan Tanjung Batu 43
4.1.1.2 Misi Kantor Kecamatan Tanjung Batu.....44
4.1.1.3 Struktur Organisasi..... 58
4.1.2 Karakteristik Responden 48
4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 48
4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....49
4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 50
4.1.3 Hasil Uji Validitas..... 51
4.1.3.1 Uji Validitas Akuntabilitas.....51
4.1.3.2 Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 52
4.1.3.3 Uji Validitas Sistem Keuangan 53
4.1.4 Hasil Uji Reabilitas 54
4.1.5 Hasil Uji Normalitas.....55
4.1.6 Uji Asumsi Klasik..... 56
4.1.6.1 Uji Multikolinearitas 56
4.1.6.2 Uji Heteroskedastisitas..... 57
4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda 58
4.1.8 Hasil Uji Hipotesis 59
4.1.8.1 Uji t (Simultan)..... 59
4.1.8.2 Uji F (Parsial) 60

4.2 Pembahasan dan Interpretasi 61
4.2.1 Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Sistem Keuangan Desa 61
4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Sistem Keuangan Desa 63
4.2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 66
5.2 Saran-saran 67

DAFTAR PUTAKA 68
LAMPIRAN 71

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 27

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan	24
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Penelitian.....	31
Tabel 3.2	Kriteria Pemilihan Sampel	32
Tabel 3.3	Variabel dan Operasional Variabel	34
Tabel 4.1	Karakteristik Berdasarkan Usia.....	48
Tabe 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas.....	51
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	52
Tabel 4. 6	Hasil Uji Validitas Sistem Keuangan	53
Tabel 4.7	Hasil Uji Reabilits	54
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas One-Sample, kolmogorov-smirnov.....	55
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glesjer	57
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.12	Hasil Uji Hipotesis Simultan	59
Tabel 4.13	Hasil Uji t	60

ABSTRAK

YUNI MULIA FITRI. Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. (Di bawah bimbingan Ibu Kusminaini Armin, SE.,MM Pembimbing I dan Bapak Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CPA.,M.Ak Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap sistem keuangan desa. Baik secara parsial da simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 kantor desa di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dengan jumlah 32 responden. Metode analisis data menggunakan pengujian validitas, reabilitas, normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

Dalam penelitian statistik bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap sistem keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari uji t dimana nilai signifikan variabel akuntabilitas adalah 0,000 < 0,05. Hasil penelitian statistik bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari uji t dimana nilai signifikan variabel akuntabilitas adalah 0,000 < 0,05. Dari hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari uji f dimana nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,05.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Keuangan Desa

ABSTRACT

YUNI MULIA FITRI. The Effect of Accountability and Implementation of Government Accounting Standards on Village Financial Systems (Siskeudes) Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. (Under the guidance of Mrs. Kusminaini Armin, SE.,MM and Mr. Dr. Riza Syahputera, SE.,Ak.CA.,CPA.,M.Ak)

This study aims to determine the effect of accountability and the application of government accounting standards on the village financial system. Both partially and simultaneously. The population in this study were 8 village offices in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. Based on sampling techniques with purposive sampling with a total of 32 respondents. The data analysis method uses validity testing, reliability, normality, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

In research statistics that partial accountability affects the village financial system. This can be seen from the t test where the significant value of the accountability variable is 0.000 <0.05. The results of statistical research that partially the application of government accounting standards has an effect on the village financial system. This can be seen from the t test where the significant value of the accountability variable is 0.000 <0.05. From the results of simultaneous research shows that the accountability variable and the application of government accounting standards have an effect on the village financial system. This can be seen from the f test where the significant value of the accountability variable is 0.000 <0.05.

Keywords: Accountability, Implementation of Government Accounting Standards, and Village Financial Systems

RIWAYAT HIDUP

YUNI MULIA FITRI, dilahirkan di Desa Bangum Jaya pada tanggal 15 Juni 2001, dari pasangan Bapak Amrah Muslimin dan Ibu Nurhayati. Kemudian menyelesaikan Sekolah Dasar pada tahun 2013 di SD Negeri 14 Tanjung Batu, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 di SMP Negeri 02 Tanjung Batu, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 di SMK Negeri 01 Tanjung Batu. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2020.

Palembang, Oktober 2026

YUNI MULIA FITRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 menyebut bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah untuk menyelenggarakan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan akuntabilitas dan tranparansi (Restufiani, 2022:3). Pernyataan tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan kepada masyarakat, yang berarti pemerintah harus siap memberikan pertanggungjawaban terkait dengan keputusan yang mereka ambil dan hasil dari kebijakan yang diterapkan pemerintahan. Dengan melakukan proses pengambilan Sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dalam semua aspek kegiatan keputusan, penggunaan

sumber daya publik, dan hasil dari kebijakan yang diterapkan. Dengan transparansi yang baik masyarakat dapat memahami alasan dibalik kebijakan pemerintah dan memantau kinerja mereka. Melalui akuntabilitas dan transparansi yang kuat, diharapkan pemerintah lebih baik dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Akuntabilitas disini mengarah kepada informasi yang disediakan oleh pemerintah mengenai adanya program, penyeleggara keuangan, kegiatan dan hasil kerja yang dilakukan pemerintah. Sehingga dengan diadakannya tanggung jawab tersebut akan menjadikan pemerintahan yang semakin maju. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Akuntabilitas bertindak dalam menyediakan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana desa yang telah digunakan. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa, yang telah dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Restufiani, 2022:2).
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas disini mengarah pada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan informasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat mengenai berbagai aspek, seperti program-program yang dijalankan, pengelolaan keuangan yang dilakukan, kegiatan yang dilaksanakan, dan hasil kerja yang telah dicapai. Dengan memberikan akses informasi yang komprehensif, masyarakat dapat memahami secara lebih baik bagaimana keputusan-keputusan pemerintah dibuat, bagaimana dana publik digunakan, dan apa hasil yang telah dicapai dari kebijakan yang diterapkan. Prinsip ini tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga memiliki dampak yang nyata dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam pengelolaan anggaran desa, penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat penting karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual *(accrual)* dalam pencatatan serta pelaporan keuangan pemerintah maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 resmi dicabut mulai tahun 2015. PP No 71 tahun 2010 ini menyajikan laporan keuangan pemerintah sebanyak 7 (tujuh) laporan, yakni: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa sebagai konsekuensi perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dikembangkanlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan (BPKP, 2018). Dari pernyataan BPKP ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan langkah penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk menyederhanakan, memudahkan operasional, dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan.

Siskeudes memungkinkan pemerintah desa untuk lebih efektif dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan dan menghasilkan informasi keuangan yang benar untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing dalam pelaporan keuangan. Sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai pertaturan yang berlaku seperti laporan realisasi, APB Desa dan laporan lainnya. Dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), dan laporan penatausahaan seperti Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register. Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa, Arfiansyah (2020:70).

Kecamatan Tanjung Batu merupakan salah satu kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di Ogan Ilir, yang terdapat 21 (dua puluh satu) desa dan 1 (satu) kelurahan. Kecamatan Tanjung Batu termasuk ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Susunan Organisasi Administrasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir.

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu sudah lama diterapkan, namun masih kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu disebabkan kurang maksimalnya dalam proses kemampuan staf. Berdasarkan fakta, akuntabilitas yang rendah di tingkat desa dapat memunculkan praktik penambahan harga yang tidak sah (*mark up*), dimana penggunaan dana desa tidak terawasi dengan baik dan memungkinkan adanya penyelewengan. Penyelewengan kekuasaan yang dilakukan kepala desa atau tindakan-tindakan di mana kepala desa menggunakan kekuasaannya secara tidak benar atau melampaui wewenangnya. Hal ini sering kali terjadi ketika kepala desa atau staf menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara seperti manipulasi dalam pengelolaan dana desa, pengaturan perijinan, atau pembagian sumber daya.

Sepuluh kepala desa dan satu orang kontraktor terbukti melakukan tindak pidana ekonomi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tindak pidana ekonomi itu berupa pembangunan lapangan sepak bola mini yang berada di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Media Indonesia, 2023). Kecurangan yang dilakukan mulai dari pembuatan proposal, penetapan penerima proposal, dan penetapan penerima fasilitas. Dalam tindak pindak ekonomi tersebut, negara diperkiran mengalami kerugian lebih kurang Rp1,3 miliar. Tindak pidana ekonomi di tingkat desa merupakan praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pengelolaan dana dan sumber daya desa untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik tindak pidana ekonomi ini dapat

merugikan masyarakat secara luas, menghambat pembangunan dan kesejahteraan, serta mengurangi kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi di desa meliputi *mark up* dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan dana pembangunan atau bantuan sosial, serta manipulasi dalam proses perizinan dan pembagian sumber daya.

Penanggulangan tindak pidana ekonomi di tingkat desa memerlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, penguatan tata kelola dan etika beradministrasi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan desa. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan konsekuensi negatif dari korupsi desa, serta membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tingkat pendidikan aparatur desa dan pemahaman mereka terhadap akuntansi pemerintahan memiliki dampak signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang transparan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketika aparatur desa memiliki pendidikan yang memadai dalam bidang terkait dan pemahaman yang baik tentang prinsip akuntansi pemerintahan, mereka cenderung mampu dalam penyusunan Laporan Keuangan yang akurat, transparansi dan akuntabilitas, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko penyelewengan. Secara keseluruhan, pendidikan dan pemahaman yang baik di kalangan aparatur desa tidak hanya mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas

pemerintahan desa. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencegah tindak pidana ekonomi dana desa oleh kepala desa dan staf, langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil antara lain adalah meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, membangun budaya organisasi yang menekankan integritas dan etika, memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada staf, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Masyarakat juga perlu dilibatkan aktif dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa untuk mengurangi risiko penyelewengan.

Peran pemimpin masih belum tegas terhadap staf dalam memberikan dukungan atasan, kejelasan tujuan serta pelatihan yang sangat dibutuhkan dan mendorong staf mengikuti penerapan standar akuntansi keuangan yang dimana sebagian staf belum mengerti atau belum paham, sehingga penyelewengan dan kecurangan dapat dicegah terhadap kegunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang membangun budaya transparansi, integritas, dan pengawasan yang kuat. Dengan memperkuat kedua aspek ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap tindak pidana ekonomi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kunci terkait pengaruh akuntabiltas dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun kebijakan dan regulasi mengenai akuntabilitas dan standar akuntansi sudah di tetapkan dengan jelas, terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapannya yang mempengaruhi efektivitas sistem keuangan desa. Salah satu isu utama adalah kurangnya pemahaman staf mengenai akuntabilitas dan standar akuntansi pemerintah. Penelitian oleh Fatimah (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman yang kurang dapat mengakibatkan pelaporan keuangan yang tidak akurat dan rendahnya transparansi. Nufaisa (2022) juga menyoroti bahwa staf yang tidak terlatih baik dalam prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan sering mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang bagaimana peningkatan pemahaman dan pelatihan staf dapat mempengaruhi akuntabilitas dan penggunaan Siskeudes.

Selain itu, penerapan standar akuntansi pemerintah masih menghadapi tantangan. Meskipun Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terdapat indikasi bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Wijaya dan Irfan (2022) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara umum memberikan dampak positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan teknis dan keterbatasan sumber daya mungkin masih ada dan tidak teridentifikasi dalam penelitian tersebut. Ini menandakan perlunya

penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala spesifik dalam penerapan SAP di tingkat desa dan dampaknya terhadap kinerja Siskeudes.

Dampak keterbatasan dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian oleh Ariyanti (2023) menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes dirancang untuk mengurangi penyelewengan, implementasi yang tidak optimal masih sering terjadi. Penelitian ini perlu menggali lebih dalam mengenai bagaimana keterbatasan dalam Siskeudes, seperti fitur-fitur yang tidak memadai atau kesalahan operasional, mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana masalah teknis dan non-teknis dalam Siskeudes berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Hubungan antara pendidikan aparatur desa dan akuntabilitas keuangan juga menjadi perhatian. Penelitian oleh Suwarno (2023) menunjukkan bahwa pendidikan aparatur desa yang memadai berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM, yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengalaman, berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Penerapan sistem akuntansi yang baik dan komitmen pimpinan juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa sinergi antara faktor-faktor ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menilai bagaimana tingkat pendidikan dan pemahaman aparatur desa di Kecamatan Tanjung Batu mempengaruhi akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam konteks Siskeudes. Penelitian ini lanjut diperlukan untuk

menilai bagaimana pelatihan dan pendidikan aparatur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan mengurangi praktik penyelewengan.

Akhirnya, peran pengawasan dalam mencegah penyelewengan dana desa perlu lebih dalam. Meskipun sudah ada pengawasan internal dan eksternal yang diatur, banyak kasus penyelwengan dana desa menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Indra dan Marissa (2022) menyoroti pentingnya peran pengawasan dalam mencegah tindak pidana ekonomi. Namun belum ada studi yang fokus pada efektivitas mekanisme pengawasan dalam konteks implementasi Siskeudes Di Kecamatan Tanjung Batu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengawasan dapat di perkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyelewengan.

Dengan demikian, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bukan hanya menjadi alat administratif semata, tetapi juga instrumen penting dalam upaya pencegahan penyelewengan dana desa. Dengan meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpotensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih terpercaya dalam pengelolaan keuangan desa, serta mendorong penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang, di beberapa kantor desa Kecamatan Tanjung Batu masih terdapat beberapa staf yang ternyata belum memahami mengenai akuntabilitas dan peneraoan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi **"Pengaruh Akuntabilitas dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan Tanjung Batu Kecamatan Ogan Ilir?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di kecamatan Tanjung Batu Kecamatan Ogan Ilir.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berukut :

1. Bagi penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes).

2. Bagi pemerintahan Kecamatan Tanjung Batu

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dijadikan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan akuntabiltas dan penerepan standar akuntansi pemerintahan terhadap sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir sehingga dapat terwujudnya Pemerintahan baik (*good governance*).

3. Bagi Civitas

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khusunya yang berkaitan dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Novia, 2020, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,* Skripsi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), *3*(1).

Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa pada Masa Pandemi Covid-19.* JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13(1), 12–23.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). Pengawalan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES. 24 Juni 2024,

Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat: Jakarta

Edowai, Mikael, dkk., 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pusaka Almaida: Sulawesi Selatan.

Gayatri, Latrini. (2018). *Efektivitas aplikasi system pelaporan keuangan Desa (studi tentang aplikasi pelaporan keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolanyu Kabupaten Tulungagung).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung. Tulungagung. Indonesia.

Ghozali, 1, 2018, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Dipenegoro: Semarang.

Hidayani, S., Kamilah, K., Tambunan, K. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 8(3), 409.

Khasanah, U., Nilasari, A. P. (2023). *Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 3(1), 283.

Krina, Loina Lalolo, 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta.

Mahmudi, 2016, *Manajemen Kinerja Sektor Publik,* Sekolah Tinggi Ilmu YKPN: Yogyakarta.

Malaha, A., Dunggio, T., & Suleman, J. (2020). *Analisis Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Tenaga Laboran di Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri Gorontalo*. Journal of Health, Technology and Science (JHTS), 1(1), 1-6.

Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 7(2), 67-81.

Nadilla, N., & Kamilah, K. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1582-1591.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Susunan Organisasi Administrasi Kecamatan dalam kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2021. *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta.

Restufiani, Alfi, 2022, *"Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Wonosari Kabupaten Malang)"*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Scott, R, William, 2015, *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition, Pearson Prentise Hall: Toronto.

Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. PT Alfabet :Bandung.

Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. PT Alfabet :Bandung.

Sujarweni, Wiratna V, 2019, *Akuntansi Sektor Publik*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*.

Wardoyo, Dwi Urip, .,Dkk, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan”. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Desember, 2022, Hal 39-43.

Yanti, Fitri, 2019, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyajian Laporan Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa (Add) Desa Rantau Bayur Sumatera Selatan Pada Implementasi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Skripsi, Universitas Tridinanti: Palembang.

Yusri dan Chairina, 2023, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Cetakan Pertama, PT Inovasi Pratama Internasional Anggota IKAPI: Padang Sidempuan.